

INTISARI

Penelitian ini mendalami pola-pola respons Thailand, Malaysia dan Indonesia terhadap pengungsi dan pencari suaka Rohingya. Studi ini berupaya memahami pola respons negara menggunakan empat hak pengungsi berdasarkan ketentuan The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yaitu: 1) refoulement dan perlindungan suaka; 2) akses kesehatan; 3) pemberdayaan keahlian dan pendidikan; dan 4) hak untuk mencari nafkah. Menyoroti gelombang pengungsi Rohingya, studi kasus yang diangkat adalah respons Thailand, Malaysia dan Indonesia atas krisis pengungsi Rohingya yang disebabkan oleh diskriminasi, genosida dan migrasi paksa. Dalam melihat situasi tersebut, penelitian ini menggunakan konsep pola Diskriminasi dan pola Delegasi pengungsi oleh Lamis Elmy Abdelaaty. Analisa penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data jurnal, buku dan website yang relevan dengan respons Thailand, Malaysia dan Indonesia atas pengungsi Rohingya. Penelitian ini menunjukkan terdapat dinamika dalam kebijakan pengungsi di masing-masing negara dengan alasan yang beragam. Sebelum 2016, Thailand memiliki pola diskriminasi karena menghadapi ancaman keamanan nasional sebagai akibat dari gelombang pengungsi Rohingya yang mendorong sentimen dari warga lokal terhadap pengungsi. Malaysia memiliki pola diskriminasi karena ancaman imigran ilegal yang berdampak pada perekonomian, dinamika politik dan penerimaan pengungsi Rohingya. Sedangkan, Indonesia memiliki pola delegasi walaupun tidak memiliki peraturan spesifik terkait pengungsi karena kekhawatiran Indonesia atas potensi radikalisasi etnis Rohingya dan perdagangan narkoba. Pasca 2016, Thailand, Malaysia dan Indonesia memiliki pola delegasi setelah mengalami tekanan internasional dan terdapat bantuan dari UNHCR dan IOM.

Kata Kunci: *Pencari Suaka, Pengungsi, Pola Diskriminasi, Pola Delegasi, Thailand, Malaysia, Indonesia*

ABSTRACT

This study explores the response patterns of Thailand, Malaysia, and Indonesia to Rohingya refugees and asylum seekers. This study seeks to understand the response patterns of countries using four refugee rights under the provisions of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), namely: 1) refoulement and protection of asylum; 2) access to health; 3) empowerment of skills and education, and 4) the right to earn a living. Highlighting the wave of Rohingya refugees, the case study raised was Thailand, Malaysia, and Indonesia's response to the Rohingya refugee crisis caused by discrimination, genocide, and forced migration. In looking at the situation, this study uses the discrimination patterns and patterns of Refugee delegation by Lamis Elmy Abdelaaty. The research analysis uses qualitative methods by collecting data from journals, books, and websites relevant to the response of Thailand, Malaysia, and Indonesia on refugees. This study shows that there are dynamics in refugee policy in each country for different reasons. Prior to 2016, Thailand had a pattern of discrimination as it faced national security threats due to a wave of Rohingya refugees that prompted sentiment from residents toward refugees. Malaysia has a pattern of discrimination due to the threat of illegal immigrants that impacts the economy, political dynamics, and acceptance of Rohingya refugees. Meanwhile, Indonesia has a delegation pattern even though it does not have specific regulations related to refugees because Indonesia was concerned over the potential radicalization of the Rohingya ethnic group and drug trafficking. Post-2016, Thailand, Malaysia, and Indonesia have a pattern of the delegation after international pressure and assistance from UNHCR and IOM.

Keywords: *Asylum Seekers, Refugees, Discrimination Pattern, Delegation Pattern, Thailand, Malaysia, Indonesia*